

## Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah (Tahun 2016-2018)

Riska Listianingsih<sup>1</sup>, Ade Gunawan<sup>2</sup>, Agus Arwani<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email: [riskalistia017@gmail.com](mailto:riskalistia017@gmail.com)<sup>1</sup>, [ade.gunawan@gmail.com](mailto:ade.gunawan@gmail.com)<sup>2</sup>, [agusarwani09@gmail.com](mailto:agusarwani09@gmail.com)<sup>3</sup>

**ABSTRAK:** Pembangunan manusia merupakan salah satu syarat mutlak bagi kelangsungan hidup bangsa dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Tercapainya tujuan pembangunan manusia tercermin pada besar kecilnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dan salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur dengan melihat tingkat kualitas pendidikan dan kesehatan. Tingginya Indeks Pembangunan Manusia tersebut terkait erat dengan kebijakan pemerintah dalam pengeluaran sektor publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan data sekunder periode pengamatan tahun 2016-2018 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik berupa data Indeks Pembangunan Manusia dan Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Tengah yaitu berupa data alokasi pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, alokasi pengeluaran pemerintah sektor kesehatan di 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016-2018 dan selanjutnya diolah menggunakan metode regresi data panel dengan program *evIEWS 12* sebagai alat pengolahannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2018. Sedangkan untuk pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak berpengaruh (negatif) dan signifikan terhadap IPM di Jawa Tengah tahun 2016-2018.

**Kata Kunci:** Pengeluaran Pemerintah, Pendidikan, Kesehatan, Indeks Pembangunan Manusia.

**ABSTRACT:** Human development is one of the absolute requirements for the survival of the nation in order to produce quality human resources. The achievement of human development goals is reflected in the size of the Human Development Index (IPM). And one of the benchmarks used to look at the quality of human life is the Human Development Index (IPM), which is measured by looking at the level of quality of education and health. The high Human Development Index is closely related to government policies in public sector spending. The purpose of this study was to analyze the effect of government spending on the education and health sectors on the human development index in Central Java province using secondary data for the 2016-2018 observation period obtained from the Central Bureau of Statistics in the form of Human Development Index data and the Directorate General of Treasury (DJPb). ) Central Java Province, namely in the form of data on the allocation of government expenditure in the education sector, allocation of government expenditure in the health sector in 35 Regencies/Cities of Central Java Province in 2016-2018 and then processed using the panel data regression method with the *evIEWS 12* program as a processing tool. The results of the study show that government spending on the education sector has a positive and significant effect on the HDI in Central Java Province in 2016-2018. Meanwhile, government spending on the health sector had no (negative) and significant effect on the HDI in Central Java in 2016-2018.

**Keywords:** Government Expenditures, Education, Health, Human Development Index.

## **1. PENDAHULUAN**

Hakikat pembangunan ekonomi adalah kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Bentuk nyata peran pemerintah dalam mendorong kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat adalah pemerintah mempunyai kewenangan besar dalam hal pengelolaan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Sementara kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dalam hal ini diarahkan pada parameter yang sudah menjadi parameter internasional dalam hal kesejahteraan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu Negara, dikatakan maju bukan saja dihitung dari pendapatan domestik bruto saja tetapi juga mencakup aspek harapan hidup serta pendidikan masyarakatnya (Widodo dkk., 2011).

Menurut Sukirno (2013), pengeluaran pemerintah (government expenditure) merupakan bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian melalui melalui instrumen anggaran. Pengeluaran pemerintah dibutuhkan untuk menambah modal fisik seperti infrastruktur dasar dan fasilitas umum, serta untuk peningkatan layanan umum seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, ketertiban dan ketentraman, dan lingkungan hidup, yang pada gilirannya dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Rosen, 2014; Sukirno, 2013).

Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan sektor Pendidikan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang antara lain diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dalam pengukuran IPM, indikator kesehatan dan pendidikan adalah salah satu komponen utama selain pendapatan, karena kesehatan serta pendidikan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dengan sumber daya manusia yang baik dan memadai maka pelaksanaan pembangunan akan semakin lancar. Pemerintah hendaknya memperhatikan hal tersebut terlebih jika memandang manusia merupakan subjek dan objek pembangunan, sehingga pembangunan manusia yang kemudian menunjang pembangunan di berbagai sektor akan mewujudkan kesejahteraan bagi manusia yang berada dalam wilayah pemerintahan tersebut (Baiq, 2017).

Pendidikan dan Kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Menurut Meier dan Rauch (dalam Brata, 2004) pendidikan atau lebih luas lagi adalah modal manusia, dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan. Hal ini karena pendidikan pada dasarnya adalah bentuk dari tabungan, menyebabkan akumulasi modal manusia dan pertumbuhan output agregat jika modal manusia merupakan input dalam fungsi produksi agregat. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk mencapai kehidupan yang layak (Septiana, Dkk. 2015).

Pengeluaran pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan sangat erat kaitannya dengan indeks pembangunan manusia, semakin tinggi angka murid yang melanjutkan ke perguruan tinggi semakin besar peluang untuk memperoleh lapangan pekerjaan dan mempunyai keahlian sehingga berkurangnya angka pengangguran dan meningkatkan produktifitas serta mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan kondisi objektif yang dipaparkan di atas, dan mengingat bahwa pengeluaran pemerintah provinsi merupakan instrumen fiskal/kebijakan anggaran yang sangat efektif dalam menstimulasi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah

sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Jawa Tengah periode 2016-2018.

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

Bigsten dan Levin, (2000) mengemukakan bahwa komposisi dari pengeluaran pemerintah merupakan faktor penentu dalam pembangunan manusia. Pendidikan mempunyai peranan penting dalam peningkatan sumber daya manusia. Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi bangsa. Hal ini bukan saja karena pendidikan akan berpengaruh terhadap produktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap fertilitas (angka kelahiran) masyarakat. Dengan pendidikan menjadikan sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan-perubahan dalam kehidupan. Jadi, pada umumnya pendidikan diakui sebagai investasi sumber daya manusia. Pendidikan memberikan sumbangan yang besar terhadap perkembangan kehidupan sosial ekonomi melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap serta produktivitas.

Manfaat dari adanya pendidikan sebagai investasi pada sumber daya manusia bagi pembangunan ekonomi suatu bangsa secara umum dapat dilihat dari pendapat Todaro (2006) diantaranya: 1. Dapat menciptakan tenaga kerja yang lebih produktif, karena adanya peningkatan pengetahuan dan keahlian; 2. Tersedianya kesempatan kerja yang lebih luas; 3. Terciptanya suatu kelompok pemimpin yang terdidik guna mengisi jabatan-jabatan penting dalam dunia usaha maupun pemerintahan; 4. Tersedianya berbagai macam program pendidikan dan pelatihan yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan dalam keahlian dan mengurangi angka buta huruf.

### **Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan**

Kesehatan adalah salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan suatu masyarakat. Melalui alokasi pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan, diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat di Indonesia untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Beberapa program yang telah dilakukan pemerintah untuk mempermudah masyarakat mengakses pelayanan kesehatan adalah program kesehatan gratis, asuransi kesehatan, dan penggunaan kartu miskin (Misdawita, 2013).

Pengeluaran Pemerintah untuk sektor kesehatan pada hakikatnya adalah meningkatkan mutu dan kualitas kesehatan di Provinsi Aceh. Secara umum, telah terjadi perbaikan yang signifikan dalam hal ketersediaan fasilitas, utamanya di daerah-daerah yang mengalami rehabilitasi pasca tsunami. Namun hal ini tidak secara langsung dapat memperbaiki kondisi kualitas kesehatan. Bila ditelisik lebih mendalam pada anggaran pengeluaran pemerintahnya maka Pemerintah Aceh masih menggunakan paradigma sakit ketimbang paradigma sehat, hal ini ditunjukkan oleh besarnya biaya yang dikeluarkan untuk rumah sakit ketimbang alokasi untuk Dinas Kesehatan dalam upaya-upaya preventif (Yuniver, 2009).

### **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia di tiap-tiap negara. Salah satu tolok ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli). Melalui peningkatan ketiga indikator tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup manusia (Mirza, 2012).

IPM dapat diwujudkan melalui realisasi belanja negara dalam pelayanan publik. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang diperkuat oleh UU No. 23 Tahun 2014, belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas

kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Kuncoro, 2013).

#### **Hubungan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Wahid (2012) mengatakan Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan maka pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Pengeluaran pembangunan dalam sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata. Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN merupakan wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan.

#### **Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Pengeluaran pemerintah dalam sektor kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Asri (2011) menyatakan melihat mutu manusia dari sisi kesehatan dimana kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia, dengan kata lain aspek kesehatan turut mempengaruhi kualitas manusia. Kekurangan kalori, gizi, ataupun rendahnya derajat kesehatan bagi penduduk akan menghasilkan kualitas manusia yang rendah dengan tingkat mental yang terbelakang. Todaro dan Smith (2003) menyatakan Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan yang dikeluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan merupakan persyaratan bagi peningkatan produktivitas masyarakat

### **3. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi data panel. Data yang terpilih dikumpulkan melalui data sekunder dalam bentuk elektronik karena data yang diperoleh di unduh dari website Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah ([www.jateng.bps.go.id](http://www.jateng.bps.go.id)) berupa data Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah dan Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Tengah ([www.djpb.kemenkeu.go.id](http://www.djpb.kemenkeu.go.id)) berupa data pengeluaran pemerintah sector pendidikan dan kesehatan. Data sekunder yang diperoleh berdasarkan waktu pengumpulannya dengan menggunakan data panel karena data yang diperoleh dari tahun 2016-2018 dengan sampel 35 Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan serta variabel dependen yaitu indeks pembangunan manusia.

Dalam penelitian ini akan digunakan beberapa pengujian data untuk menguji dan mengolah data yang akan dianalisis. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis statistik yang meliputi uji regresi data panel, uji hipotesis dan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas dan Uji Heteroskedastisitas. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Eviews 12.

Menurut (Ghozali dan Ratmono, 2017), model regresi data panel merupakan model analisis yang menggunakan data panel yaitu gabungan antara dua deret waktu (time-series) dan data

deret lintang (cross- section). Dalam penelitian ini digunakan model analisis regresi linear berganda dengan data panel. Analisis regresi data panel adalah alat analisis regresi dimana data dikumpulkan secara individu (cross-section) dan diikuti pada waktu tertentu (time-series). Pada penelitian ini terdapat dua variabel bebas yang akan dimasukkan ke dalam persamaan model regresi yaitu Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan, sehingga persamaan model regresi data panel yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$\text{Model Regresi Data Panel adalah sebagai berikut: } Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + e.$$

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 Hasil Penelitian

###### 1. Pemilihan Model

Dalam pemilihan metode data panel pada penelitian ini menggunakan Chow Test dan Hausman Test. Hasil dari ke-2 pengujian tersebut adalah sebagai berikut:

a) Chow Test, digunakan untuk memilih apakah model yang tepat digunakan pada penelitian yaitu Common Effect Model atau Fixed Effect Model.

H0 : Common Effect, jika nilai Probabilitas F statistiknya tidak signifikan pada  $\alpha = 5\%$ .

H1 : Fixed Effect, jika nilai probabilitas F statistiknya signifikan pada  $\alpha = 5\%$ .

**Tabel 1.**  
**Hasil Uji Chow Test**

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	df	Prob.
Cross-section F	402.015346	(34,68)	0.0000
Cross-section Chi-square	557.372097	34	0.0000

*Sumber: Eviews 12, data diolah 2022.*

Hipotesis dalam menentukan model regresi data panel adalah jika nilai Prob. Cross-section Chi-square  $< 0,05$  maka kita akan memilih fixed effect dari pada common effect. Dan sebaliknya jika nilai Prob. Cross-section Chi-square  $> 0,05$  maka model yang dipilih adalah common effect daripada fixed effect. Pada penelitian ini didapatkan nilai Prob. cross section chi-square sebesar  $0,0000 < 0,05$ . Berdasarkan hal tersebut model yang baik digunakan pada penelitian ini yaitu Model Fixed Effect.

b) Hausmant Test, digunakan untuk memilih apakah Model Random Effect atau Model Fixed Effect yang akan digunakan pada penelitian.

H0 : Random Effect, jika nilai Chi-squarenya tidak signifikan pada  $\alpha = 5\%$ .

H1 : Fixed Effect, jika nilai Chi-squarenya signifikan pada  $\alpha = 5\%$

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Hausman Test**

Correlated Random Effects- Hausman Test  
Equation: Untitled  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	7.625290	2	0.0221

Sumber: Eviews 12, data diolah 2022.

Jika Hausman Test menerima H1 atau p value pada cross section random < 0,05 maka metode yang akan pilih adalah fixed effect. Jika Hausman Test menerima H0 atau p value cross section random > 0,05 maka metode yang kita pilih adalah random effect. Pada penelitian ini didapatkan nilai Prob. cross section random sebesar 0,0221 < 0,05. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa model yang baik digunakan pada penelitian ini yaitu Fixed Effect Model.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini model terbaik yang digunakan Fixed Effects. Model ini dipilih karena model Fixed Effects lebih baik dibandingkan dengan model lain yang telah diuji dengan menggunakan uji F (Uji Chow) dan Uji Hausman.

## 2. Pengujian Statistik

### a. Estimasi Fixed Effect Model

Estimasi fixed effects adalah teknik pengestimasi dengan menggunakan variabel dummy penggunaan model ini tepat untuk melihat perubahan perilaku data dari masing-masing variabel sehingga data lebih dinamis dalam menginterpretasi data.

**Tabel 3**  
**Fixed Effect Model**

Dependent Variable: IPM  
Method: Panel Least Squares  
Date: 06/29/22 Time: 13:26  
Sample: 2016 2018  
Periods included: 3  
Cross-sections included: 35  
Total panel (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	71.19391	0.250540	284.1614	0.0000
PENDIDIKAN	7.55E-13	3.31E-13	2.282987	0.0256
KESEHATAN	-1.77E-12	1.68E-13	-10.55202	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.995199	Mean dependent var	71.19848
Adjusted R-squared	0.992657	S.D. dependent var	4.473437
S.E. of regression	0.383327	Akaike info criterion	1.190451
Sum squared resid	9.991874	Schwarz criterion	2.125656
Log likelihood	-25.49867	Hannan-Quinn criter.	1.569414
F-statistic	391.5484	Durbin-Watson stat	2.818968
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Eviews 12, data diolah 2022.

$$IPM = 71.1939091853 + 7.54894749029e-13 * PENDIDIKAN - 1.76934856639e-12 * KESEHATAN$$

b. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah sesuatu yang menunjukkan seberapa besar variasi variabel dependen IPM dapat dijelaskan oleh variabel independen Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan. Dari hasil regresi menggunakan model fixed effect, nilai  $R^2$  sebesar 0.995199, artinya adalah variabel dependen IPM dapat dijelaskan oleh variabel independen Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan sebesar 99.5 % dan sisanya sebesar 0.5 % dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

c. Uji t-statistik

Uji t digunakan untuk melihat seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Uji ini akan membandingkan nilai p-value dengan  $\alpha$ . Jika  $p\text{-value} < \alpha$  maka  $H_0$  ditolak dan sebaliknya apabila  $p\text{-value} > \alpha$  maka  $H_a$  diterima. Untuk melihat pengaruh variabel  $X_1$  dan  $X_2$  terhadap variabel  $Y$  juga dapat dilihat dari hasil t-statistik uji t, yaitu apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima, artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Begitu juga sebaliknya jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak, artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

1. Pengujian terhadap variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

Berdasarkan hasil uji diketahui nilai prob. t-statistik dari Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan sebesar  $0,0256 < 0,05$ , maka  $H_0$  diterima artinya menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan signifikan terhadap IPM. Adapun apabila dilihat dari t-statistik hasil analisis uji t yaitu Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan ( $X_1$ ) terhadap indeks pembangunan manusia dinyatakan dengan t-hitung  $X_1$  sebesar 2,282987, dan nilai t-tabel dengan nilai signifikan  $\alpha = 0,05$  dan  $df = (105-3)$ , sehingga  $df = (105-3) = 102$ , jadi nilai t-tabel adalah sebesar 1,65993 dan dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai t-hitung  $> t$ -tabel ( $2,282987 > 1,94318$ ) maka pengeluaran pemerintah sektor pendidikan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2018.

2. Pengujian terhadap variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

Berdasarkan hasil uji diketahui nilai prob. t-statistik dari Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan sebesar  $0,0000 < 0,05$ , maka  $H_0$  diterima artinya menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan signifikan terhadap IPM. Adapun apabila dilihat dari t-statistik hasil analisis uji t yaitu Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia t-hitung  $> t$ -tabel ( $-10.55202 < 1,94318$ ) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2018.

**3. Uji F – statistic**

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Nilai F-hitung berdasarkan hasil regresi diatas sebesar 391.5484 dengan probabilitas sebesar  $0.000000 < \alpha = 5\%$  sehingga secara statistik model estimasi fixed effect variabel independen Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan ( $X_1$ ) dan Pengeluaran

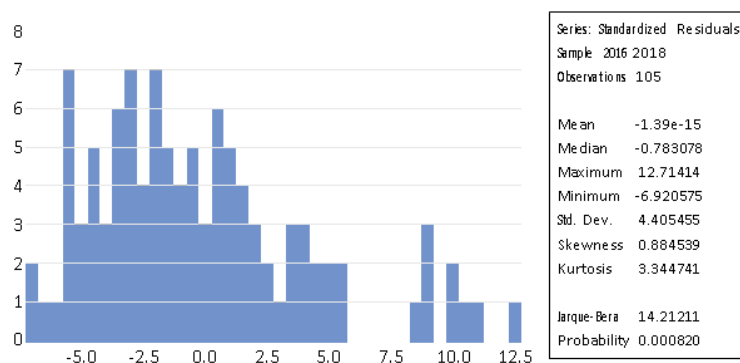
Pemerintah Sektor Kesehatan (X2) secara bersama-sama signifikan mempengaruhi variabel dependen Indeks Pembangunan Manusia (Y) di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2018.

d. Uji Asumsi Klasik

1. Uji normalitas

Menurut (Ghozali dan Ratmono, 2017), uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Normalitas**



Sumber: Eviews 12, data diolah 2022.

Dasar menentukan normal atau tidaknya data yaitu apabila nilai dari probabilitas jarque bera lebih besar dari tingkat alpha 0,05 maka data berdistribusi normal. Sebaliknya apabila nilai dari probabilitas jarque bera lebih kecil dari tingkat alpha 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan nilai jarque bera sebesar 14,212 yang mana lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Menurut (Ghozali dan Ratmono, 2017), multikolinieritas adalah keadaan dimana terjadi hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen dalam model regresi. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam regresi ini ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi maka dinamakan terdapat masalah multikolinieritas. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya masalah multikolinieritas.

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

	PENDIDIKAN	KESEHATAN
PEND...	1	0.28128680...
KESE...	0.28128680...	1

Sumber: Eviews 12, data diolah 2022.

Kriteria penilaian uji multikolinieritas yaitu apabila nilai dibawah 0,8 maka data terbebas dari multikolinieritas, namun apabila nilai lebih besar dari 0,8 maka data terjangkau masalah multikolinieritas. Berdasarkan hasil uji menunjukkan nilai sebesar 0,281287, artinya lebih kecil dari 0,8 maka dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini tidak terjangkau masalah.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Ghozali dan Ratmono, 2017), uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada beberapa cara yang dilakukan untuk mendeteksi heteroskedastisitas, diantaranya adalah dengan menggunakan grafik Scatterplot dan juga Uji Glejser. Pada grafik Scatterplot, apabila tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan Uji Glejser dapat dilihat dengan cara menghasilkan regresi nilai absolut residual (AbsUi) terhadap variabel independen lainnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.875033	0.552046	7.019407	0.0000
PENDIDIKAN	-7.42E-13	7.29E-13	-1.018128	0.3122
KESEHATAN	4.45E-13	3.69E-13	1.204435	0.2326

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.936280	Mean dependent var	3.460144
Adjusted R-squared	0.902545	S.D. dependent var	2.705608
S.E. of regression	0.844629	Akaike info criterion	2.770472
Sum squared resid	48.51113	Schwarz criterion	3.705677
Log likelihood	-108.4498	Hannan-Quinn criter.	3.149435
F-statistic	27.75451	Durbin-Watson stat	1.770082
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Eviews 12, data diolah 2022.

Nilai p value variabel X1 (Pendidikan) sebesar 0,3122 dan X2 (Kesehatan) sebesar 0,2326 hasil ini menunjukkan nilai yang lebih besar dari tingkat alpha (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

## 4.2 Pembahasan

### 1. Pengaruh Pengeleuran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Pendidikan merupakan tonggak dalam perekonomian, melalui pendidikanlah sumber daya manusia yang berkualitas dapat terbentuk. Pemerintah memegang peran penting dalam suatu pembangunan, salah satunya yakni pembangunan manusia yang dapat dibentuk melalui pendidikan. "Pemerintah menempatkan pendidikan sebagai faktor penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hal tersebut terlihat dari besarnya pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan. Pemerintah menyediakan anggaran minimal 20% dari APBN untuk bidang pendidikan". Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2018. Nilai koefisien Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan sebesar 7.548947 yang artinya apabila APBD untuk pendidikan meningkat sebesar 1 rupiah akan menaikkan IPM Provinsi Papua sebesar 7.548947 persen, sedangkan nilai probabilitasnya sebesar 0.0256. Adanya hubungan positif antara pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dengan Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan bahwa semakin tinggi pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, maka IPM juga akan meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa besarnya Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan yang dialokasikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah digunakan untuk program-program yang tepat yang dapat berpengaruh langsung terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Tri Mariani (2010) dan Devyanti Patta (2012). Dimana disebutkan bahwa Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil analisis sesuai dengan teori (Wahid, 2012). Menyatakan Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan maka pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Meriang Kahang (2016), Rahmita Handayani (2015), dan M Alyuriza Syalkafi (2016) juga memperoleh hasil yang sama dengan penelitian ini dimana disebutkan bahwa Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

## **2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Kesehatan, Undang-undang di Indonesia yang mengatur mengenai anggaran kesehatan adalah UU No 36 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji (Rumate 2015).

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2018 dengan nilai koefisien sebesar -1.769349, untuk nilai probabilitasnya sebesar 0.0000 dan nilai t hitung  $-10.55202 < 1,94318$  (t tabel), maka  $H_0$  ditolak. Hasil yang negatif ini menunjukkan bahwa setiap

pengurangan variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan akan menurunkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Nadia Ayu Bhakti, dkk (2014). Hal ini terjadi karena anggaran untuk kesehatan masih terlalu kecil sehingga belum mampu meningkatkan IPM di provinsi Jawa Tengah. Anggaran atau alokasi dana yang sedikit dirasa tidak akan mampu meningkatkan IPM. Hal ini mengindikasikan bahwa besarnya Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan yang dialokasikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak digunakan untuk program-program yang tepat yang dapat berpengaruh langsung terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia.

## **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dimana setiap terjadi perubahan pada Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2018. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji signifikan ( $0,0256 < 0,05$ ) dan uji parsial dengan nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel ( $2,282987 > 1,94318$ ). Dengan demikian peningkatan alokasi belanja untuk pendidikan dapat mendorong kualitas sumber daya manusia yang tercermin pada peningkatan IPM.
2. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan tidak berpengaruh (negatif) dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dimana setiap terjadi perubahan pada pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2018. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji signifikan ( $0,0000 < 0,05$ ) dan uji parsial dengan nilai thitung lebih kecil dari nilai ttabel ( $-10,55202 < 1,94318$ ). Hasil yang negatif ini menunjukkan bahwa setiap pengurangan variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan akan menurunkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
3. Berdasarkan hasil uji simultan pada penelitian ini, diketahui bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2018.
4. Dalam realitanya Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah, tidak dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan. Hal tersebut terjadi, karena pada periode tahun 2016-2018, anggaran pengeluaran pemerintah sektor kesehatan masih sangat kecil. Anggaran pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan, masih jauh dibawah setiap tahunnya selama priode pengamatan jika dibandingkan dengan alokasi pengeluaran ataupun belanja pemerintah lainnya, seperti pengeluaran pemerintah sektor paendidikan terus meningkat hal ini lah yang menyebabkan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan berpengaruh signifikan dalam meningkatkan Indeks Pembngunan Manusia, di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2018.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andiny, P dan Merlindiana Gus Puja Sari. (2018). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Langsa. *JURNAL SAMUDRA EKONOMIKA*, 2(2), 116-125.
- Kuncoro, M. 2010. *Dasar-dasar ekonomikapembangunan* (Edisi Kelima ed.). Yogyakarta. Mardiyani, Mursalina. (2018). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kampar Tahun 2008-2017. Skripsi. Program Sarjana Faklutas Ekonomi Universitas Islam Riau.
- Merang, Kahang, dkk. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur. Skripsi. Program Sarjana Faklutas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Indonesia.
- Mirza, Danni S. 2012. Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. *Economics Development Analysis Journal*.
- Sukirno, Sadono. 2007. *Ekonomi Pembangunan: Proses Masalah dan Dasar Kebijakan Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana.
- Todaro, M.P. dan Smith Stephen. C. 2003. "Pembangunan Ekonomi di Dunia". Ketiga. Edisi kedelapan. Jilid 2. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, Michael P & Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan*. Jakarta: Erlangga.
- Adi Widodo, dkk. (2011). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*. Vol. 1, No 1. Hal 25-42.
- BPS, 2016-2018, *Indeks Pembangunan Manusia, Provinsi Jawa Tengah*.
- Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Tengah, 2016-2018, *Pengeluaran Sektor Pendidikan dan Kesehatan, Provinsi Jawa Tengah*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Wahid, Bila. A. 2012. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi", Makassar